

**DIMENSI EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI DAN BANTUAN SOSIAL : MENIMBANG ANTARA KESEJAHTERAAN DAN KEPENTINGAN POLITIK**

**Rut Afentina Sinambela<sup>1</sup>, Salsabila Fayza<sup>2</sup>, Cindy Eleonora Sitohang<sup>3</sup>, Armin Rahmansyah Nasution<sup>4</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email Korespondensi: rutsinambelatahun2018@gmail.com

Email: salsabilafayza21@gmail.com; cindyeleonora01@gmail.com; armin@unimed.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the political economy dimensions of subsidy and social assistance policies in Indonesia by weighing the goals of public welfare against political interests. Subsidies and social assistance are important instruments in public policy that serve to reduce poverty, maintain social stability, and strengthen the purchasing power of low-income communities. However, in practice, these policies are often inseparable from political interests and the government's populist strategies. Through a descriptive qualitative approach using literature review methods, this study examines the relationship between economic and power aspects in the formulation and implementation of subsidy and social assistance policies. The results of the analysis show that subsidies and social assistance are often used as populist political instruments to gain legitimacy and electoral support, especially ahead of elections. Although these policies can improve short-term welfare, dependence on assistance and long-term fiscal distortions are major challenges. In addition, power dynamics and weak governance undermine the effectiveness of these policies, as the distribution of benefits is often misdirected and tends to favor dominant groups. Therefore, transparent, accountable, and sustainable welfare-oriented public policy governance is needed so that subsidies and social assistance can function optimally as instruments of social justice, not merely political tools.

**Keywords:** Political economy, subsidies, social assistance, welfare, political interests

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi ekonomi politik dalam kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) di Indonesia dengan menimbang antara tujuan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan politik. Subsidi dan bansos merupakan instrumen penting dalam kebijakan publik yang berfungsi mengurangi kemiskinan, menjaga stabilitas sosial, dan memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali tidak terlepas dari kepentingan politik dan strategi populis pemerintah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, penelitian ini menelaah hubungan antara aspek ekonomi dan kekuasaan dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan subsidi dan bansos. Hasil analisis menunjukkan bahwa subsidi dan bantuan sosial sering digunakan sebagai instrumen politik populis untuk memperoleh legitimasi dan dukungan elektoral, terutama menjelang pemilu. Meskipun kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan jangka pendek, ketergantungan terhadap bantuan dan distorsi fiskal jangka panjang menjadi tantangan utama. Selain itu, dinamika kekuasaan dan tata kelola yang lemah memperburuk efektivitas kebijakan, karena distribusi manfaat sering kali tidak tepat sasaran dan cenderung berpihak pada kelompok dominan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan agar subsidi dan bansos dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar alat politik.

**Kata Kunci:** Ekonomi politik, subsidi, bantuan sosial, kesejahteraan, kepentingan politik

## PENDAHULUAN

Kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Melalui kebijakan ini, negara berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial. Subsidi energi, bantuan pangan, dan berbagai program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan hak dasar warga terpenuhi. Namun, di balik fungsi sosial dan ekonomi tersebut, terdapat dimensi lain yang tak kalah penting, yaitu dimensi politik yang sering kali memengaruhi arah, besaran, dan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam konteks ekonomi politik, subsidi dan bantuan sosial tidak hanya dilihat sebagai kebijakan ekonomi semata, tetapi juga sebagai alat politik yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh legitimasi, mempertahankan kekuasaan, atau membentuk citra populis pemerintah di mata masyarakat. Fenomena politisasi kebijakan sosial kerap muncul menjelang momen elektoral, di mana penyaluran bantuan sosial meningkat tajam dan diarahkan pada wilayah atau kelompok pemilih tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan sering kali menjadi ruang negosiasi antara kepentingan ekonomi publik dan kepentingan politik elit.

Dari sisi ekonomi, subsidi dan bansos memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Penelitian (Umar et al., 2025) menegaskan bahwa *social assistance* (Bansos) adalah instrumen kebijakan publik yang penting untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial. Transformasi program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa bantuan sosial telah berperan penting sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, karena mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli rumah tangga miskin, terutama dalam situasi krisis ekonomi.

Selain itu, kebijakan subsidi, terutama subsidi energi, juga menunjukkan dilema antara tujuan kesejahteraan dan efisiensi fiskal. Subsidi yang bersifat universal sering kali justru dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, sehingga manfaatnya menjadi tidak tepat sasaran. Penelitian (Haliim & Far Muhammad, 2025) menemukan bahwa peningkatan alokasi bantuan sosial tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan. Program seperti BLT dan PKH sering kali dimanfaatkan sebagai alat politik menjelang pemilu dan tidak tepat sasaran, di mana distribusi bantuan lebih banyak diterima oleh kelompok yang memiliki hubungan politik atau status sosial menengah ke atas. Kebijakan sosial seperti subsidi dan bantuan tunai cenderung reaktif dan tidak menyentuh akar struktural kemiskinan. Dominasi kepentingan politik dalam alokasi subsidi menyebabkan inefisiensi fiskal dan ketimpangan penerima manfaat, karena kelompok menengah ke atas kerap memperoleh manfaat lebih besar daripada masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama.

Secara teoritis, kajian mengenai ekonomi politik menempatkan negara, pasar, dan masyarakat dalam satu arena interaksi yang saling memengaruhi. Dalam konteks kebijakan subsidi dan bantuan sosial, dimensi ekonomi politik dapat dilihat dari bagaimana aktor politik menggunakan kebijakan ekonomi untuk membangun legitimasi, sementara di sisi lain, aktor ekonomi dan masyarakat berupaya memengaruhi kebijakan agar menguntungkan kepentingan mereka. Ketidakseimbangan kekuatan ini sering kali menyebabkan kebijakan tidak sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan, melainkan turut mencerminkan dinamika kekuasaan dan kepentingan politik yang sedang berlangsung.

Penelitian tentang “Dimensi Ekonomi Politik dalam Kebijakan Subsidi dan Bantuan Sosial: Menimbang antara Kesejahteraan dan Kepentingan Politik” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana interaksi antara tujuan kesejahteraan publik dan kepentingan politik membentuk arah, implementasi, serta efektivitas kebijakan subsidi dan bantuan sosial di Indonesia. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional, buku akademik, laporan penelitian, hasil kajian lembaga resmi, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan subsidi dan bantuan sosial di Indonesia. Metode ini dipilih karena topik penelitian bersifat konseptual dan analitis, sehingga lebih tepat dilakukan melalui pengkajian terhadap data sekunder yang sudah tersedia.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam hubungan antara kebijakan ekonomi (subsidi dan bantuan sosial) dengan kepentingan politik di balik perumusannya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan fenomena sosial-politik yang melatarbelakangi kebijakan tersebut tanpa menggunakan data statistik, melainkan dengan analisis makna, konteks, dan arah kebijakan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan membaca, mengidentifikasi, dan mengelompokkan tema-tema utama dari berbagai literatur yang dikaji, seperti dimensi kesejahteraan, legitimasi politik, populisme fiskal, serta politisasi bantuan sosial. Setiap data dan argumen dari sumber pustaka kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan pola hubungan antara aspek ekonomi dan politik dalam kebijakan publik.

Adapun kriteria pemilihan literatur mencakup sumber-sumber akademik yang:

1. Berasal dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi, buku akademik, atau dokumen kebijakan resmi pemerintah; dan
2. Memiliki fokus bahasan pada isu subsidi, bantuan sosial, kebijakan fiskal, serta dinamika politik kesejahteraan di Indonesia.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis mengenai bagaimana kebijakan subsidi dan bantuan sosial tidak hanya menjadi instrumen ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga berperan sebagai alat politik dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Subsidi dan Bantuan Sosial Sebagai Instrumen Politik Populis

Kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah seringkali tidak hanya dimaknai sebagai upaya murni untuk mengentaskan kemiskinan atau memelihara kesejahteraan sosial, melainkan juga sebagai instrumen politik yang bersifat populistis. Dalam konteks ini, subsidi dan bansos berfungsi sebagai alat legitimasi politik yang memungkinkan aktor kekuasaan memperoleh atau mempertahankan dukungan publik, terutama menjelang pemilihan umum atau di tengah krisis sosial-ekonomi. Studi menunjukkan bahwa alokasi dana bansos yang meningkat secara signifikan menjelang pemilu dapat dikaitkan dengan strategi “*pork-barrel*” atau patronase politik di mana program sosial diarahkan untuk memperkuat elektabilitas petahana. Selain itu, bantuan sosial juga dapat mengalami “politisasi anggaran” ketika pendistribusiannya dikaitkan dengan simpati atau loyalitas politik penerima bantuan (Muchammad Iqbal Firmansyah. & Purwaningsih, 2021).

Lebih lanjut, kebijakan subsidi termasuk subsidi energi atau barang pokok dapat disadari atau tidak disadari menjadi bagian dari strategi populisme fiskal, di mana janji “harga murah” atau “bantuan langsung” diberikan untuk memperlihatkan keberpihakan negara kepada rakyat biasa. Orientasi populistis melalui subsidi ini seringkali menghadirkan legitimasi politik namun memiliki sifat sementara, karena beban fiskal yang ditimbulkan bisa membebani anggaran negara dan pemerintah rentan menghadapi dilema ketika kondisi ekonomi memburuk. Dengan demikian, kebijakan sosial yang idealnya berbasis kebutuhan dan target kesejahteraan, dalam praktiknya dapat berubah arah menjadi alat politik yang lebih mementingkan pencapaian elektoral daripada keberlanjutan program (Widya Putri et al., 2025).

Di tingkat implementasi, bantuan sosial sebagai instrumen politik populistis sering memunculkan

ketergantungan di antara penerima, sekaligus melemahkan daya tawar masyarakat terhadap perubahan struktural yang lebih permanen. Sebagai contoh, penelitian di wilayah Temanggung menunjukkan bahwa kebijakan bansos menimbulkan rasa aman jangka pendek bagi penerima, namun juga melekatkan mereka pada posisi “penerima” sehingga berdampak pada kurangnya dorongan untuk pemberdayaan mandiri. Oleh karena itu, meskipun kebijakan subsidi dan bansos mungkin berhasil meredam tekanan sosial secara cepat dan memberikan hasil elektoral yang menguntungkan, secara jangka panjang bisa gagal menciptakan perubahan yang stabil dan berkelanjutan (Sugiastuti & Ulinnuha, 2023).

Secara teoritis, konsep kebijakan populis dalam politik sosial menekankan bahwa tindakan pemerintah yang tampak “pro-rakyat” sering kali dikemas dalam simbol keberpihakan, namun substansinya menimbulkan dilema: antara tujuan kesejahteraan sosial dan tujuan politik kekuasaan. Kebijakan subsidi dan bantuan sosial sebagai instrumen politik populis menunjukkan bahwa politik kesejahteraan bukan hanya soal distribusi sumber daya, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan mengkonstruksikan citra dan dukungan publik melalui program sosial. Hal ini mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, kebijakan sosial harus dilihat bukan hanya dari efektivitas teknis tetapi juga dari dinamika politik yang menyertainya.

## Dampak Terhadap Kesejahteraan Jangka Pendek dan Distorsi Fiskal Jangka Panjang

Kebijakan subsidi dan bantuan sosial pada dasarnya dirancang untuk mereduksi beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpendapatan rendah. Dalam jangka pendek, program semacam ini terbukti mampu meningkatkan daya beli, menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, serta menekan potensi gejolak sosial di masa krisis. Subsidi energi, misalnya, dapat menahan laju inflasi sementara, sementara bantuan sosial tunai berperan sebagai *shock absorber* bagi kelompok miskin ketika harga kebutuhan pokok meningkat. Efek langsung ini memberikan kesan positif terhadap kinerja pemerintah karena kesejahteraan masyarakat tampak membaik dalam waktu singkat.

Namun, kesejahteraan yang dihasilkan bersifat sementara (*transitory welfare*). Ketergantungan masyarakat terhadap subsidi dan bansos tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dapat melemahkan kapasitas ekonomi jangka panjang. Program yang bersifat konsumtif cenderung tidak menciptakan nilai tambah ekonomi, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan maupun penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, meskipun indikator kemiskinan menurun dalam jangka pendek, tingkat kesejahteraan struktural masyarakat tetap stagnan. Dalam banyak kasus, bantuan sosial bahkan memunculkan efek moral hazard, di mana sebagian penerima tidak terdorong untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Dari sisi fiskal, kebijakan subsidi yang berorientasi populis menimbulkan distorsi dan tekanan terhadap anggaran negara. Ketika porsi subsidi dalam belanja pemerintah meningkat secara signifikan, ruang fiskal untuk pembiayaan sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terbatas. Hal ini menciptakan risiko *crowding out effect*, di mana dana publik terserap untuk konsumsi jangka pendek daripada investasi jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini diperparah ketika subsidi tidak tepat sasaran, karena manfaatnya justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang memiliki daya konsumsi tinggi.

Selain itu, distorsi fiskal juga berdampak pada stabilitas makroekonomi. Ketergantungan terhadap kebijakan subsidi dalam jangka panjang dapat mengganggu kredibilitas fiskal pemerintah, menurunkan rasio efisiensi belanja publik, serta meningkatkan risiko defisit anggaran. Dalam konteks ini, kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan justru berpotensi menghambat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun subsidi dan bantuan sosial memiliki manfaat nyata dalam menjaga kesejahteraan jangka pendek, keberlanjutannya perlu dievaluasi secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal dan ketergantungan sosial. Diperlukan desain kebijakan yang lebih tepat sasaran, berbasis produktivitas, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar dampak positifnya dapat



dirasakan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan distorsi ekonomi dan fiskal di masa depan.

## Dinamika Kekuasaan dan Tata Kelola Kebijakan Publik

Dalam konteks kebijakan publik, dinamika kekuasaan menjadi faktor utama yang memengaruhi proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi suatu kebijakan. Kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kapasitas formal yang dimiliki oleh lembaga pemerintah, tetapi juga mencakup jaringan kepentingan, relasi sosial, dan struktur ekonomi-politik yang membentuk proses pengambilan keputusan publik. Dalam realitasnya, kebijakan publik lahir melalui proses negosiasi di antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan publik tidak pernah steril dari politik, karena prosesnya melibatkan pertarungan wacana, ideologi, serta kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Menurut (Assegaf & Rifqi, 2022) setiap kebijakan publik secara inheren merupakan hasil dari proses politik, di mana relasi kekuasaan menentukan arah dan prioritas kebijakan. Mereka menegaskan bahwa *"all policy-making activities are by nature political processes"*, menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan selalu melekat dalam seluruh tahapan kebijakan publik.

Tata kelola kebijakan publik atau *governance* tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan yang ada. *Governance* ideal menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, pada praktiknya, idealitas ini sering kali berbenturan dengan kompromi politik, patronase, serta kepentingan elektoral yang mendominasi proses kebijakan. Akibatnya, *governance* di sektor publik sering menghadapi tantangan berupa rendahnya akuntabilitas dan bias dalam pengambilan keputusan, yang membuat efektivitas kebijakan publik tidak maksimal. Penelitian (Afrijal et al., 2024) menemukan bahwa tata kelola program subsidi listrik gratis di Aceh Jaya tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan prinsip *good governance*. Implementasinya justru dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal dan keberpihakan pada kelompok tertentu. Hal ini memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan lokal memengaruhi efektivitas kebijakan, sehingga prinsip transparansi dan partisipasi publik sering diabaikan dalam praktiknya.

Kebijakan subsidi dan bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat daya beli masyarakat miskin, dan memastikan pemerataan kesejahteraan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tata kelola dan ketepatan sasaran, agar benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Penelitian (Gobel et al., 2024) menjelaskan bahwa kebijakan subsidi energi di Indonesia sering kali tidak inklusif karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Studi ini menyoroti ketimpangan distribusi manfaat dan menunjukkan bahwa struktur ekonomi-politik memengaruhi bagaimana kebijakan subsidi disusun dan dijalankan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan kesejahteraan tidak lepas dari kepentingan dan distribusi kekuasaan di masyarakat.

Dalam praktiknya, kebijakan subsidi dan bantuan sosial sering dijadikan arena politik oleh aktor-aktor berkuasa. Program bantuan sosial yang semestinya berorientasi pada pengentasan kemiskinan kerap dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, terutama menjelang pemilu. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi kekuasaan dapat menggeser tujuan kesejahteraan menuju kepentingan politik jangka pendek. Oleh karena itu, tata kelola kebijakan bansos menjadi cerminan penting dari sejauh mana institusi publik mampu menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian (Achmad, 2024) menemukan bahwa distribusi bantuan sosial di Indonesia memiliki korelasi signifikan dengan strategi elektoral. Bansos sering dimanfaatkan untuk membangun citra politik dan meningkatkan elektabilitas aktor tertentu menjelang pemilu. Temuan serupa juga diperkuat oleh (Umar et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan membuat program bansos rawan korupsi dan manipulasi politik, sehingga efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan menjadi rendah.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

383

Indexed

SINTA 5



PKP|INDEX



Kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan subsidi dan bantuan sosial tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan dan tata kelola pemerintahan yang melingkupinya. Dinamika kekuasaan berperan penting dalam menentukan arah, isi, serta implementasi kebijakan, sementara kualitas tata kelola menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika relasi kekuasaan yang mendominasi lebih berorientasi pada kepentingan politik ketimbang kepentingan publik, kebijakan yang semestinya menjadi instrumen keadilan sosial justru berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sebaliknya, jika prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas dijalankan secara konsisten, maka kebijakan subsidi dan bantuan sosial dapat berperan optimal sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan perlindungan sosial. Dengan demikian, memahami kebijakan publik dari perspektif ekonomi politik menjadi penting untuk menilai sejauh mana interaksi antara kekuasaan dan tata kelola mampu menghadirkan kesejahteraan yang inklusif serta mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat. Subsidi dan bansos sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik sebagai alat legitimasi, citra populis, dan sarana mempertahankan kekuasaan, terutama menjelang momen elektoral.

Secara ekonomi, kebijakan subsidi dan bansos mampu memberikan dampak positif jangka pendek, seperti meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan konsumsi rumah tangga. Namun, manfaat tersebut sering bersifat sementara dan tidak selalu berkelanjutan. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah tanpa pemberdayaan produktif menyebabkan masyarakat sulit mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran menimbulkan distorsi fiskal, mengurangi efisiensi anggaran, dan membatasi ruang fiskal untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dari sisi politik, kebijakan sosial yang idealnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat kerap bergeser menjadi instrumen populisme fiskal dan patronase politik. Politisasi subsidi dan bansos memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi arah dan prioritas kebijakan publik. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan (*governance*) memiliki peran krusial. Ketika *prinsip good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik tidak dijalankan dengan baik, kebijakan sosial berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, memahami kebijakan subsidi dan bantuan sosial melalui pendekatan ekonomi politik memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang hubungan antara kesejahteraan publik dan kepentingan politik. Kesejahteraan sejati tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh keadilan, integritas, dan keberlanjutan kebijakan yang dijalankan oleh negara.

## REFERENSI

- Achmad, W. (2024). Politics and Social Welfare: Dynamics of Social Assistance Programs on Electability in Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(2), 205–215. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53634>
- Afrijal, Herizal, Saddam Rasanjani, & Mukhrijal. (2024). Pork Barrel Politics: A Case Study of the Free Electricity Program in Aceh Jaya Local. *Journal of Local Government Issues*, 7(2), 159–175. <https://doi.org/10.22219/logos.v7i2.32249>
- Alba, A. (2018). Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, 4(1), 72–89.
- Asril, S. (2013). Aktor Politik Kontemporer Dalam Perspektif Psychocultural. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1),

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

384

Indexed



1–15.

- Assegaf, N. A., & Rifqi, M. (2022). Social Welfare Condition in Indonesia & The Need for Research and Innovation. *International Journal of Economics and Management Studies*, 9(1), 24–29. <https://doi.org/10.14445/23939125/ijems-v9i1p104>
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. *Substansi*, 1(2), 373–389.
- Efimtseva, T., & Plankin, A. (2024). ON THE ISSUE OF THE GOALS AND LEGAL PRINCIPLES OF PROVIDING SOCIAL ASSISTANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION. *Oeconomia et Jus*. <https://doi.org/10.47026/2499-9636-2024-1-70-86>.
- Fauzi, M. Q., & Insany, M. A. Al. (2019). *KONSEP EKONOMI POLITIK DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN*. 6(1), 154–169.
- Gobel, R. K., Laksmono, B. S., Huseini, M., & Siscawati, M. (2024). Equity and Efficiency: An Examination of Indonesia's Energy Subsidy Policy and Pathways to Inclusive Reform. *Sustainability (Switzerland)*, 16(1), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su16010407>
- Haliim, W., & Far Muhammad, J. '. (2025). Inefficiency of Social Assistance in Reducing Poverty Rates: Recommendations for Alternative Social Policies for Poverty Alleviation in Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 29(1), 89–109. <https://doi.org/10.22146/jkap.104396>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*, 323, 35–36.
- Heliaantoro, & Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., P. . (2018). Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 37–65.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Maiwan, M. (2015). Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), 109–124. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/9114>
- Muchammad Iqbal Firmansyah., F. R., & Purwaningsih, T. (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>
- Muharam, R. S., Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini. (2025). Gas Subsidi untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik atas Efisiensi dan Pemerataan Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(1), 182–195. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5795>
- Niño-Zarazúa, M. (2019). Welfare and Redistributive Effects of Social Assistance in the Global South. *Population and Development Review*. <https://doi.org/10.35188/unu-wider/2019/716-3>.
- Seda, P. P., Supriyadi, S., & Wahidin, S. (2020). Kedudukan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Penghapusannya dalam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 112–124. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5533>.
- Sudibyo, A. (2000). Absennya Kajian Ekonomi Politik Media di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(2), 115–134. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11116>.
- Sugiastuti, N., & Ulinuha, R. (2023). Politik Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat: Kasus Ketergantungan Kebijakan Bantuan Sosial di Temanggung, Jawa Tengah. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.78588>
- Umar, M. M., Hamidi, M., Joshi, J. S., Bahri, F. P. Al, & Ramazalena, R. (2025). Social Assistance Policy in Indonesia: Corruption, Politicization, and Governance Challenges. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 11(2), 99–118. <https://doi.org/10.29103/jsds.v11i2.24299>
- Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. Intermedia Jakarta.
- Widya Putri, Siti Nur Fadhillah, & Monika, D. (2025). PERAN EKONOMI POLITIK SUBSIDI ENERGI: ANTARA KEPENTINGAN ELITE DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. *Jurnal*

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

385

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX

oneSearch

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

*PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 8(2), 331–338.

Yuliani, N. M., Paturochman, I. R., Mubarak, A. T., & Muzaki, R. A. (2025). Kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 296-300.